

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Deskripsi Tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilu” yang dilatarbelakangi oleh maraknya praktik politik uang dalam Pemilu dan Pilkada di Indonesia. Politik uang dianggap sebagai akar dari korupsi politik karena melahirkan pemimpin yang lebih mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok dibandingkan kepentingan rakyat. Walaupun telah diatur dan dilarang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, praktik politik uang masih terus terjadi, bahkan menimbulkan perdebatan terkait konsistensi putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana. Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup : (1) motif pelaku melakukan tindak pidana politik uang ; (2) modus pelaku dalam melakukan tindak pidana politik uang ; serta (3) akibat hukum yang diterima oleh pelaku berdasarkan Undang-Undang Pemilu dan Pilkada. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis motif, modus, serta akibat hukum dari praktik politik uang sebagaimana tercermin dalam putusan pengadilan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif. Data penelitian diperoleh dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, dan penelitian terdahulu. Teknik analisis yang digunakan adalah kualitatif dengan menelaah putusan hakim pada lima perkara tindak pidana politik uang di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motif pelaku dalam tindak pidana politik uang umumnya dilatarbelakangi oleh ambisi memperoleh jabatan politik dan kepentingan kelompok tertentu. Modus yang digunakan bervariasi, mulai dari pembagian uang tunai, pemberian barang, hingga janji fasilitas kepada pemilih. Akibat hukum bagi pelaku adalah pidana penjara dan denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu dan Pilkada, meskipun dalam praktiknya sanksi yang dijatuhkan hakim sering kali lebih ringan dari tuntutan jaksa. Hal ini menimbulkan persoalan terkait efek jera dan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana politik uang di Indonesia.

Kata kunci: *Politik Uang, Penegakan Hukum, Pemilu, Hukum Pidana*

ABSTRACT

This research, entitled “Description of Law Enforcement of Political Money Crimes in Elections”, is motivated by the widespread practice of money politics in general and local elections in Indonesia. Money politics is considered the root of political corruption because it produces leaders who prioritize personal or group interests over the public interest. Although it has been regulated and prohibited in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections and Law Number 10 of 2016 concerning Regional Head Elections, money politics continues to occur, raising debates regarding the consistency of judges’ decisions in imposing criminal sanctions. The research problems focus on: (1) the motives of perpetrators in committing money politics crimes; (2) the modus operandi employed in committing money politics; and (3) the legal consequences imposed on perpetrators under the Election Law and the Regional Election Law. The purpose of this study is to identify and analyze the motives, modus operandi, and legal consequences of money politics practices as reflected in court decisions. This study uses normative legal research with a descriptive approach. Research data were obtained from primary legal materials in the form of legislation and court rulings, as well as secondary legal materials such as literature, journals, and previous studies. The analysis technique employed is qualitative by examining judges’ decisions in five cases of money politics handled by District Courts and High Courts. The results show that the perpetrators’ motives are generally driven by political ambition and group interests. The modus operandi varies, ranging from distributing cash, giving goods, to promising facilities to voters. The legal consequences imposed are imprisonment and fines as regulated in the Election and Regional Election Laws. However, in practice, the sentences handed down by judges are often lighter than the prosecutors’ demands, raising concerns regarding deterrence and the effectiveness of law enforcement against money politics in Indonesia.

Keywords: *Money Politics, Law Enforcement, Elections, Criminal Law*